

Dari peta konsep tersebut dapat diuraikan bahwa latar belakang lahirnya Marhaenisme tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor internal dan eksternal yang memengaruhi cara pandang Sukarno dalam menganalisis kondisi masyarakat Indonesia yang menderita akibat penjajahan kolonial Belanda. Pertama faktor internal pengalaman hidup langsung di tengah rakyat kecil membuat Sukarno menyaksikan kemiskinan dan ketertindasan yang mereka alami, sementara di sisi lain ia juga menyadari adanya struktur sosial yang timpang dan mengekang kehidupan rakyat. Sehingga masyarakat Hindia Belanda berada dalam kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan.

Faktor eksternal, akibat adanya penjajahan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda, mendorong cara berpikir Sukarno untuk bisa menemukan solusi terbebas dari penjajahan yang membuat sengsara rakyatnya. Kesadaran ini kemudian diperkuat oleh pengaruh berbagai aliran pemikiran (*isme*) yang membuka pandangannya terhadap ketidakadilan sistem kolonial, sehingga mendorongnya untuk merumuskan Marhaenisme sebagai alat perjuangan kemerdekaan demi membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

Memasuki tahun 1924–1925, Sukarno mulai merumuskan sintesis pemikiran antara tiga arus ideologi utama, yaitu nasionalisme, Marxisme, dan Islam. Nasionalisme dipahami sebagai alat pemersatu bangsa melawan kolonialisme, Marxisme digunakan sebagai alat analisis terhadap penindasan kelas, sementara Islam memberikan dasar etika sosial dan semangat keadilan.

Dalam proses ini, Sukarno menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan harus melibatkan massa rakyat sebagai subjek utama, bukan hanya elit politik. Tahap ini menandai lahirnya kerangka ideologis yang kelak dikenal sebagai Marhaenisme, meskipun istilah tersebut belum digunakan secara resmi.<sup>32</sup>

Sukarno berhasil melahirkan gagasan-gagasan yang relevan dengan kondisi masyarakat pada masanya. Ia tidak hanya meniru mentah-mentah pemikiran dari

---

<sup>32</sup> Sukarno, 1928. “*Pemandangan Dan Pengajaran*”, dalam *Fikiran Ra'jat* dimuat dalam *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I (Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1964), hlm. 63–70.

luar, melainkan mengolahnya dan menggabungkannya dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah rakyat. Dengan cara itulah Marhaenisme menjadi gagasan yang kontekstual, lahir dari realitas sosial bangsa sendiri.

Secara garis besar, terdapat tiga aliran utama yang membentuk landasan pemikiran Sukarno. Pertama, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa yang menekankan gotong royong, harmoni, dan solidaritas sosial. Kedua, pemikiran para tokoh sosialis Barat, termasuk Karl Marx, yang menumbuhkan kesadaran tentang penindasan kaum kapitalis terhadap kaum pekerja. Ketiga, pengaruh pemikiran modernisme Islam yang menekankan kemajuan, rasionalitas, serta tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat. Perpaduan ketiga aliran pemikiran inilah yang kemudian melahirkan Marhaenisme sebagai gagasan khas Indonesia yang menjadi dasar perjuangan kemerdekaan menurut Sukarno.<sup>33</sup>

Melalui caranya sendiri, Sukarno mengumpulkan aliran-aliran yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, kemudian diolah sendiri menjadi ide baru yang dianggap bisa diterima oleh semua pihak. Proses semacam ini di dalam ilmu pengetahuan sosial disebut dengan “sinkretisme”, yaitu proses menerima dan mengubah unsur-unsur yang berbeda menjadi suatu yang dikehendaki oleh si pemroses sendiri. Sinkretisme dipahami sebagai suatu cara pandang yang berusaha menggabungkan berbagai macam nilai, tradisi, dan pemikiran yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, meskipun di dalamnya masih terdapat kontradiksi atau perbedaan yang tidak sepenuhnya terselesaikan. Dalam konteks pemikiran Sukarno, sinkretisme ini tampak pada usahanya untuk meramu keragaman nilai dari berbagai aliran pemikiran dan budaya Jawa dalam sebuah pandangan yang lebih menyeluruh. Dengan cara ini, sinkretisme tidak menuntut keseragaman, tetapi justru menerima keberagaman untuk membentuk harmoni<sup>34</sup>

Pemahaman Sukarno terkait Marxisme juga harus perlu diperhatikan, karena Sukarno membuat garis pemisah yang tegas antara Marxisme dan Komunisme.

---

<sup>33</sup> Alfian. “ *Pemikiran dan perubahan Politik di Indonesia*”, (Jakarta : Gramedia, 1982) Hlm 77 – 80

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 115.

Marxisme tidak berarti komunisme, marxisme adalah suatu *denkmethode* (metode berpikir). Metode berpikir untuk mengerti bagaimana perjuangan harus dijalankan agar bisa tercapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Jelasnya, pemahamannya Sukarno terkait Marxisme itu konsisten, sebagai suatu isme yang tidak anti terhadap Tuhan. Oleh karena itu Sukarno tidak sungkan mengeksplisitkan Marxisme dalam Marhaenisme dengan rumusan awal bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan sesuai keadaan di Indonesia<sup>35</sup>.

Dari uraian di atas dasar-dasar pemikiran Sukarno adalah memberi akomodasi pada aliran-aliran penting yang hidup di dalam masyarakat, yaitu ke dalam persatuan dalam suatu *common denominator*. Ia membuang filsafat materialisme dari Marxisme, kemudian kemunduran masa lampau Islam dihapuskan diberinya ide kemajuan dari Marxis. Yang tidak kalah penting dari ajaran politik Sukarno adalah hal yang menyangkut tentang Nasionalisme. Kemudian Nasionalisme ini merupakan suatu istilah yang samar-samar, sesuatu yang mempunyai makna berbeda bagi setiap bangsa.

Isitilah Marhaen ditunjukkan kepada mereka yang melarat, maka Marhaenisme adalah isme atau ajaran tentang mereka yang dimelaratkan oleh sistem kapitalisme dan feodalisme. Kemudian Marhaenisme diberi makna sebagai kata pemersatu, simbol bagi orang yang melarat.<sup>36</sup> Oleh sebab itu seorang marhaen memiliki atau tidak memiliki alat produksi sendiri dan seorang marhaen bisa berarti juga seorang yang bekerja untuk seorang majikan dan seorang yang tidak bekerja kepada seorang majikan pun. Berbeda dengan proletar seperti yang dimaksudkan oleh Karl Marx, yaitu seseorang atau buruh yang tidak mempunyai alat produksi sendiri. Jadi ada kemungkinan seorang proletar bisa berupa orang yang berkecukupan dan bisa pula orang yang sangat miskin.<sup>37</sup>

Menurut pandangan Sukarno, struktur masyarakat Indonesia belum industrialisasi seperti di Barat. Bedanya adalah massa marhaen tidak terdiri dari satu kelompok saja, tetapi beragam kelompok kecil seperti : petani kecil, pengusaha kecil, buruh

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 120 – 122.

<sup>36</sup> Peter Kasenda, *Op. cit.*, hlm. 4

<sup>37</sup> Peter Kasenda, *Loc. cit*

kecil, nelayan dan sebagainya sama – sama menanggung akibat dari kekejaman akibat imperialisme<sup>38</sup>. Sebetulnya antara Marhaen dan proletar pada waktu Karl Marx, tidak ada perbedaan yang sangat jauh. Keduanya melambangkan manusia yang hidupnya ditindas, dimiskinkan oleh suatu sistem yang mendinas yaitu kapitalisme<sup>39</sup>.

Dalam konteks kondisi di Indonesia pada masa penjajahan kolonial, kaum Marhaen dipahami sebagai golongan rakyat kecil yang hidup dalam kemiskinan akibat penindasan yang dilakukan tidak hanya oleh kaum penjajah, tetapi juga oleh para bangsawan pribumi yang menjadi majikan dalam sistem feodalisme. Mereka menjadi korban dari dua lapis penindasan sekaligus, penjajahan asing yang mengeksploitasi sumber daya dan tenaga mereka, serta feodalisme pribumi yang turut melanggengkan ketimpangan sosial demi mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya.

Marhaen dan proletar merupakan dua istilah yang berbeda secara konseptual, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam hal mendeskripsikan posisi masyarakat kelas bawah yang hidup dalam kondisi penindasan dan ketidakadilan. Istilah proletar diperkenalkan oleh Karl Marx di Eropa untuk menggambarkan kaum buruh yang tidak memiliki alat produksi dan hanya mengandalkan tenaganya untuk bekerja pada pemilik modal. Sementara itu, istilah Marhaen digunakan oleh Sukarno untuk merujuk pada rakyat kecil di Indonesia yang walaupun memiliki alat produksi sendiri dalam skala kecil, tetap hidup dalam kemiskinan karena hasil kerjanya dieksploitasi oleh kaum kapitalis, kolonialis, maupun kaum feodal pribumi.<sup>40</sup>

Dalam konteks perjuangan kaum Marhaen, diakui bahwa kaum proletar memiliki kontribusi yang besar karena perjuangan mereka dianggap lebih terorganisasi, rasional, dan terbuka terhadap gagasan pembaruan sosial. Kaum proletar yang terbiasa dengan kerja kolektif dan kesadaran kelas yang tinggi seringkali menjadi garda terdepan dalam menggalang perlawanan terhadap sistem

---

<sup>38</sup> Ign. Gatut Saksono *Op.cit* hlm. 50 - 51

<sup>39</sup> Ign. Gatut Saksono *Loc.cit* hlm. 50

<sup>40</sup> Peter Kasenda, *Loc. cit*

kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, sangat wajar apabila kaum proletar ditempatkan sebagai pelopor dalam perjuangan antikapitalisme dan antiimperialisme yang juga menjadi bagian dari perjuangan kaum Marhaen di Indonesia.<sup>41</sup>

Marhaenisme tiada lain adalah bentuk daripada reaksi Sukarno melihat bangsanya yang sedang dijajah oleh kekuatan asing. Beberapa aliran atau pandangan hidup mempengaruhi Sukarno seperti Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Tanpa semuanya itu Sukarno tidak mungkin menjadi seorang perumus Marhaenisme, dalam konteks ini tentu saja kita akui bahwa Karl Marx-lah yang paling banyak memberikan inspirasi bagi Sukarno dalam merumuskan Marhaenismenya sebagai teori perjuangan sekaligus merupakan tujuan. Tujuan ini akan tercapai apabila sistem kapitalisme dan feodalisme sudah dihapuskan. Untuk tercapainya tujuan tersebut haruslah ditempuh dengan cara-cara perjuangan yang revolusioner dengan tahap sosio – nasionalisme dan tahap sosio-demokrasi.<sup>42</sup>

### 2.3 Landasan Filsafat

Filsafat berasal dari kata *philosophia* serapan dari bahasa Yunani yang beraarti “mencintai kebijaksanaan”. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata filsafat berasal dari *philosophy* dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *falsafah*, yang biasa diterjemahkan dengan “cinta kearifan”<sup>43</sup> istilah *philosophia* memiliki akar kata *philien* yang berarti mencintai dan *sophos* yang berarti bijaksana. Jadi, istilah *philosophia* berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut dengan filsuf atau filosof.<sup>44</sup>

Sumber dari filsafat adalah manusia, dalam hal ini akal dan kalbu manusia yang sehat yang berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Proses mencari kebenaran itu melalui berbagai

---

<sup>41</sup> Ign. Gatut Saksono, *Op. cit* hlm. 50

<sup>42</sup> Ign. Gatut Saksono, *Op.cit.* hlm. 58

<sup>43</sup> A. Susanto, “*Filsafat Ilmu : Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*” (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2019) hlm 1

<sup>44</sup> A. Susanto, *Loc. cit.* hlm 1

tahap. Tahap pertama manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Tahap kedua, dari berbagai hal spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Tahap ketiga, buah pikiran tadi titik awal dalam mencari kebenaran (penjelajahan pengetahuan yang didasari kebenaran) kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan, pemikiran baru, politik dan lain-lain.<sup>45</sup> Menurut Immanuel Kant “filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, etika, serta masalah ketuhanan”<sup>46</sup>

Marhaenisme merupakan bagian dari filsafat eklektisisme adalah sikap yang condong berfilsafat dengan seleksi dalam seleksi itu ada sebuah upaya menyelaraskan apa yang benar dari semua tokoh filsuf, sambil membuang ajaran-ajaran yang dianggap keliru. Memilih gagasan konsep atau keyakinan dari bermacam sistem pikiran dalam proses menyusun suatu sistem kita sendiri<sup>47</sup>. eklektisisme mengarah kepada sinkretisme meskipun dalam prosesnya kerap kurang memperhatikan konteks maupun kesahihan ide-ide yang disatukan.<sup>48</sup>

Sementara itu, landasan eklektisisme Sukarno adalah eklektisisme epistemologi yakni, suatu metode intelektual dalam memilih gagasan. Epistemologi pada dasarnya berbicara tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa dasar kebenarannya, dan bagaimana cara menilai validitas suatu gagasan<sup>49</sup>. Dalam konteks Marhaenisme dan pemikiran Sukarno, epistemologi menjadi penting karena menunjukkan cara berpikir dan metode intelektual yang digunakan Sukarno dalam merumuskan ide-idenya. Sukarno tidak hanya menggabungkan nilai secara etis, tetapi juga menggunakan pertimbangan rasional dan metodologis dalam memilih ide-ide dari berbagai arus pemikiran politik. Dengan cara ini Sukarno tidak hanya sekadar mencari harmoni moral, melainkan juga membangun kerangka konseptual yang kokoh dengan melalui proses intelektual yang selektif.

---

<sup>45</sup>A, Susanto *Op.cit*, hlm 2

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>47</sup> Lorens Bagus. “*Kamus Filsafat*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 181-182,

<sup>48</sup> A, Susanto, *Op. cit*, hlm. 182

<sup>49</sup> Lorens Bagus. “*Kamus Filsafat*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 212

Artinya Sukarno melakukan epistemologi. Pertama, sumber pengetahuan yang diperoleh Sukarno mendapatkan inspirasi dari pengalaman langsung bersama rakyat (empiris), empiris disini jika pernyataan-pernyataan adalah benar bila bekorespondensi (sepadan) dengan dunia kenyataan dan ide-ide berkolerasi dengan kenyataan melalui persepsi-persepsi yang diterima dari dunia, kemudian dari bacaan teori Barat seperti Marxisme (rasional) ketika Sukarno sudah memasuki situasi pengetahuan dengan sebuah ide atau kumpulan ide yang ingin dihadapkan dengan kenyataan untuk melawan penjajahan Kolonial Belanda dan dari nilai-nilai budaya serta agama (intuisi dan tradisi).<sup>50</sup>

Kedua, metode pengetahuan. Sukarno menguji gagasan dengan cara menyeleksi ide-ide yang sesuai dengan realitas Indonesia. Misalnya, dari Marxisme ia mengambil metode berpikir (*denkmetode*) tentang penindasan kelas, tetapi menolak ateisme dan materialisme yang bertentangan dengan keyakinan bangsa karena masyarakat Indonesia mempercayai adanya tuhan dan takut dengan Tuhan<sup>51</sup>.

Dengan demikian, landasan filsafat Sukarno bersifat eklektis epistemologi, yaitu memadukan unsur-unsur yang relevan dengan tetap memperhatikan metode intelektual dalam menyeleksi gagasan (sinkretisme moral), membangun kerangka konseptual yang koheren untuk perjuangan kemerdekaan bangsa. Artinya Marhaensime sulit kalau dikategorikan sebagai ideologi karena Marhaenisme merupakan sinkrestime beberapa aliran pemikiran yang diambil oleh Sukarno dari telaah bacaan Sukarno mengenai Marxisme serta hasil diskusi-diskusi dari tokoh pemikiran nasionalisme sekuler di Indonesia

#### **2.4 Asas Marhaenisme**

Marhaenisme memiliki asas yang berlandaskan pada sosio-nasionalisme sosio-demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat cara pemrintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Cara pemerintahan ini sekarang menjadi cita-cita semua partai yang berhaluan nasionalis

---

<sup>50</sup> Lorens Bagus. “*Kamus Filsafat*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.182

<sup>51</sup> Fauzian Aulia Muslim. Dalam seminar “*Marhaenisme Dialektika Pemikiran Sukarno dan Marxisme*” bedah buku “*Dibawah Bendera Revolusi jilid I*” 18 September 2025

di Indonesia, tetapi dalam mencita-citakan paham serta cara pemerintahan demokrasi itu kaum Marhaen harus berhati-hati, jangan meniru demokrasi yang dilakukan oleh negara-negara Barat.<sup>52</sup>

#### 2.4.1 Sosio-Nasionalisme

Marhaenisem memiliki asas sosio-nasionalisme yaitu nasionalisme yang bertujuan untuk menyelamatkan seluruh warga masyarakat. Karena sebagian besar warga masyarakat adalah kaum Marhaen, maka sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang mengusahakan kesejahteraan kaum tertindas dari penindasan kapitalisme dan feodalisme<sup>53</sup>. Ciri dari nasionalisme marhaen adalah menolak segala tindak tanduk sistem borjuisme karena sistem ini telah terbukti melakukan penindasan terhadap sebagian rakyat (termasuk kaum Marhaen) sehingga menyebabkan kepincangan masyarakat.<sup>54</sup> Demokrasi politik saja belum cukup untuk menyelamatkan rakyat, bahkan di negeri-negeri seperti Inggris, Prancis, Amerika, Belanda dan lain-lainnya. Telah menjalankan demokrasi tetapi kapitalisme masih merajalela dan kaum proletarnya sengsara. Kaum nasionalis Indonesia tidak boleh meniru demokrasi ala barat tersebut, nasionalisme marhaen haruslah nasionalisme yang perikemanusiaan.<sup>55</sup>

Sosio-nasionalisme ini juga mencakup sekaligus bidang politik dan ekonomi. Jadi sistem masyarakat yang akan diperjuangkan oleh nasionalisme semacam ini, yaitu sistem yang memberi kebebasan di bidang politik dan ekonomi bagi rakyat Marhaen. Oleh karena itu maka sosio-nasionalisme adalah nasionalisme marhaen dan menolak tiap tindak borjuisme yang menjadi sebab kepincangan masyarakat, jadi sosio-nasionalisme mencakup nasionalisme, politik dan ekonomi. Suatu nasionalisme yang mencari kebesaran politik dan kestabilan ekonomi.<sup>56</sup>

Maka dari itu, kaum Marhaen harus memiliki nasionalisme sendiri. Nasionalisme yang apabila nanti Indonesia mencapai tahap merdeka, tidak ada lagi

---

<sup>52</sup> Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi” *Op.cit.* hlm. 171

<sup>53</sup> Peter Kasenda *Op. cit* hlm 96

<sup>54</sup> Peter Kasenda *Lock. cit* hlm 96

<sup>55</sup> Sukarno. ”*Demokrasi-politik dan Demokrasi-ekonomi*”, dalam Fikiran Ra’jat, 1932, dimuat dalam Dibawah Bendera Revolusi, 1964) hlm 172-173.

<sup>56</sup> Dibawah Bendera Revolusi *Op. cit*, hlm. 175



penindasan dan penghisapan terhadap kaum marhaen. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan suatu nasionalisme marhaen yang berbeda dengan nasionalismenya feodal dan kapitalis. Nasionalisme Marhaen haruslah berupa nasionalisme yang mencari keselamatan seluruh masyarakat.

Anti-kapitalisme dan anti-imperialisme, merupakan salah satu nilai paling mendasar dari Marhaenisme adalah penolakan terhadap sistem tersebut. Sukarno menilai bahwa sistem kapitalis telah menjadi akar dari penjajahan dan eksploitasi terhadap bangsa Indonesia. Dalam sistem kolonial, alat-alat produksi dikuasai oleh kaum kapitalis asing, sementara rakyat Indonesia hanya menjadi tenaga kerja murah yang terus dieksploitasi.

Sosio-nasionalisme ini juga disebut “nasionalisme marhaen” adalah menolak segala tindakan sistem borjuisme yang menjadi sebab terjadinya kemelaratan masyarakat, nasional-isme yang tidak melayang akan tetapi berpijak pada masyarakat. Sosio – nasionalisme ini juga sekaligus merupakan nasionalisme politik dan ekonomi, suatu nasionalisme yang bermaksud mencari kebebasan politik dan ekonomi<sup>57</sup>.

#### **2.4.2 Sosio-Demokrasi**

Sosio-Demokrasi adalah bentuk demokrasi yang berakar dari masyarakat itu sendiri. Istilah "sosio" merujuk pada masyarakat, sementara konsep demokrasi yang dimaksud Sukarno berbeda dengan demokrasi ala Barat. Ia memandang bahwa demokrasi Barat merupakan demokrasi yang dikendalikan oleh kaum borjuis atau kelompok pemilik modal yang bertujuan mempertahankan kepentingan perusahaan-perusahaan mereka di suatu negara. Kaum borjuis ini muncul sebagai kekuatan yang menentang dominasi penguasa lama di Eropa, seperti raja, bangsawan, dan tokoh-tokoh agama yang sebelumnya memegang kekuasaan. Menurut Sukarno, kaum borjuis memobilisasi rakyat untuk menentang kekuasaan kelompok-kelompok tradisional, seperti bangsawan dan tokoh agama, dengan

---

<sup>57</sup>Sukarno, “*Djawab Saja Pada Saudara Mohammad Hatta*”, dalam *Fikiran Ra’jat*, 1933, dimuat dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, 1964 hlm 212

tujuan memperluas dominasi ekonomi mereka melalui perusahaan-perusahaan yang mereka miliki.<sup>58</sup>

Sosio-demokrasi merupakan reaksi terhadap demokrasi yang muncul di Barat (terutama Perancis) dipahami Sukarno sebagai demokrasi yang lebih bersifat liberalistik, artinya hanya menjamin kebebasan politik warga negaranya. Kebebasan ini ternyata tidak berlaku di bidang ekonomi. Akibatnya, golongan kaya atau kaum borjuis dan kapitalis terus berkembang dengan pesat atas penderitaan kaum buruh (proletar). Oleh sebab itu, agar tidak ada lagi penindasan terhadap sesama warga negara atau dengan perkataan lain supaya terjadi juga kebebasan di bidang ekonomi atas warga negara sesuatu masyarakat, Sukarno menegaskan bahwa di dalam suatu masyarakat itu sistem kapitalisme harus dihapus karena selama sistem itu masih ada tidak mungkin terjadinya adanya kebebasan ekonomi.

Singkatnya, sosio-demokrasi ini tiada lain adalah suatu sistem demokrasi dalam suatu masyarakat yang tanpa adanya kapitalisme, suatu demokrasi yang mengabdikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosio – demokrasi ini hanya akan tumbuh dan berkembang kalau sebelumnya sudah ada semangat sosio – nasionalisme dalam diri warga masyarakat. Sosio – demokrasi adalah tahapan Pembangunan atau persiapan menuju ke masyarakat sosialis Indonesia yang menguntungkan kaum marhaen setelah merdeka. Demikian pula kaum marhaen harus berkuasa dalam menentukan aturan ekonomi, produksi dan distribusi.<sup>59</sup>

Sukarno menolak bentuk demokrasi ala negara-negara Barat yang cenderung dikendalikan oleh kepentingan ekonomi kaum borjuis. Bagi Sukarno, demokrasi yang sejati lahir dari semangat sosio-nasionalisme yakni nasionalisme yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Demokrasi seperti ini tidak berpihak pada golongan tertentu, melainkan diperjuangkan sepenuhnya demi kepentingan seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang sejati, dibutuhkan asas perjuangan yang kokoh. Dalam konteks perjuangan kaum Marhaen untuk meraih kemerdekaan, Sukarno menegaskan perlunya perjuangan total dan

---

<sup>58</sup> Ign. Gatut Saksono, *Op. cit.* Hlm. 97

<sup>59</sup> Ign. Gatut Saksono, *Loc. Cit.* Hlm. 97

habis-habisan. Bentuk perjuangan tersebut antara lain adalah non-kooperasi dengan penjajah, pembentukan kekuatan politik rakyat (*machtvorming*), serta mobilisasi massa secara aktif (massa-aksi). Semua itu merupakan bentuk perlawanan yang menyatu dalam satu tujuan: membebaskan rakyat dari penjajahan dan membentuk pemerintahan yang benar-benar berakar pada kepentingan rakyat.

## 2.5 Ciri-ciri Masyarakat Marhaen

Pada periode 1925–1926, Sukarno mulai menggunakan istilah “Marhaen” untuk menyebut rakyat kecil Indonesia yang tertindas oleh sistem kolonial. Istilah ini digunakan untuk membedakan kondisi rakyat Indonesia dengan proletariat industri Eropa. Konsep Marhaen menjadi simbol rakyat kecil yang memiliki alat produksi sendiri, tetapi tetap mengalami penindasan struktural. Fase ini, Marhaenisme mulai terbentuk sebagai gagasan yang menekankan pembebasan rakyat kecil, perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme, serta pentingnya perjuangan nasional berbasis massa. Periode 1922–1926 dengan demikian merupakan fase embrional dan konseptual Marhaenisme sebelum diterapkan secara praksis dalam gerakan politik setelah tahun 1927.<sup>60</sup>

Kalau di dalam sosio–demokrasi, Sukarno memberi uraian yang bersifat umum yaitu suatu masyarakat yang menolak adanya sistem kapitalisme dan feodalisme serta melihat bahwa kebebasan bagi warga negara bukan hanya di bidang politik saja melainkan dibidang ekonomi.<sup>61</sup> Ciri *pertama* dalam masyarakat marhaenis yaitu berlakunya paham “sama rata sama rasa”. Sukarno menegaskan bahwa masyarakat semacam ini akan terwujud apabila sudah tidak ada lagi sistem kapitalisme. Oleh sebab itu, untuk mencapai masyarakat “sama rata sama rasa” sistem kapitalisme harus dilenyapkan. Karena paham “sama rata sama rasa” ini hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang tanpa kapitalis, yaitu masyarakat sosialis. Atau dengan kata lain, kemakmuran harus dinikmati oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. Paham ini juga tidak dibenarkan dalam suatu

---

<sup>60</sup> Cindy Adams, *Op,cit* hlm. 121–125.

<sup>61</sup> Ign. Gatut Saksono, *Op. cit.* Hlm. 98

masyarakat ada golongan warga yang hidup berkelimpahan sedangkan yang lain dalam kemiskinan.<sup>62</sup>

Ciri *kedua*, yaitu penghapusan milik pribadi atas alat-alat produksi. Pada marhaenisme Sukarno sejauh yang diinginkan yaitu adanya pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang menghapus adanya sistem kapitalis dan penyitaan semua perusahaan besar. Bahwa dalam membangun masyarakat kolektivis yang tiada lain adalah masyarakat sosialis, kemudia PNI secara tersurat menegaskan segala hak milik pribadi atas alat – alat produksi dihapuskan karena hak milik pribadi semacam itu dapat digunakan untuk menindas orang atau golongan lain.

Ciri *ketiga* yaitu adanya perjuangan kelas. Artinya masyarakat marhaenisme itu hanya dapat dicapai melalui perjuangan kelas. Masyarakat terbagi atas mereka yang kaya (borjuis) dan mereka yang miskin (marhaen), kaya dan miskin mereka bukan disebabkan oleh nasib atau oleh faktor lain seperti keberuntungan (ketidakberuntungan), kemalasan (rajin) dan lain – lain. melainkan adanya struktur dari proses masyarakat yang tidak adil. Maksudnya adalah bahwa struktur proses masyarakat adalah tidak adil apabila ada golongan yang belum dapat bebas dari penindasan dan kemiskinan serta belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan golongan yang telah mencapainya malah dapat lebih memperbaiki keadaannya.<sup>63</sup>

Sejak awal, pengaruh ajaran Marxisme dalam gerakan nasionalis di kalangan kaum Marhaen sebenarnya cukup besar. Sukarno menggambarkan nasib kaum marhaen dengan cara analisis yang marxistis. Kalau Marx menyebutkan salah satu sebab mengapa kaum proletar hidup dalam kemiskinan adalah karena mereka tidak menguasai alat-alat produksi. Maka berbeda dengan kaum marhaen, sekalipun menguasai alat produksi tanah dan alat-alat pertanian lainnya, tapi ternyata tetap juga miskin. Hamper seperti Lenin, Sukarno menyebutkan bahwa kolonialisme sebagai sebab utamanya.

---

<sup>62</sup> Ign. Gatut Saksono, *Loc. cit.* Hlm. 98

<sup>63</sup> Ign. Gatut Saksono, *Op. cit.* Hlm. 99

Sukarno menyebutkan bahwa penindasan dan penghisapan terhadap kaum marhaen di Indonesia jauh lebih buruk dari penindasan di Eropa Barat, karena kaum kapitalis yang menjadi sumber berkembangnya imperialisme dan kolonialisme harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar, untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraan kaum buruh di negara–negara tersebut. Kemudian Sukarno dengan jelas mengatakan bahwa marhaenisme adalah Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ign, Gatut Saksono, *Op, cit.* Hlm. 74.